

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Bermotor pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan dalam menginventarisir barang milik daerah pemerintah Provinsi NTT. Dalam hal penyusutan aset tetapnya Dinas Sosial telah sepenuhnya menerapkan Standar akuntansi Pemerintahan sesuai mekanisme yang berlaku. Akan tetapi dalam penataan atau inventarisir asetnya, Dinas Sosial belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan hal ini nampak pada daftar inventaris aset Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa aset tetap dalam hal ini kendaraan bermotor yang masa manfaatnya telah melewati umur ekonomisnya masih tetap dicatat dalam buku daftar inventaris barang milik daerah.
2. Belum adanya kendaraan pengganti, sehingga kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak digunakan menurut PSAP masih beroperasi dan masih dicatat dalam daftar aset tetap yang dimiliki pemerintah.

## 6.2. Saran

1. Diharapkan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penghapusan bagi Aset Tetap yang masa manfaatnya telah melampaui batas dan yang tidak memberikan manfaat bagi instansi.
2. Apabila Dinas Sosial melakukan penghapusan bagi kendaraan yang sudah melampaui batas umur ekonomis, maka ada dua keuntungan yang diperoleh yakni dapat mengurangi pembebanan anggaran pemerintah dalam pemeliharaan kendaraan, dan pemerintah memperoleh penghasilan atau pendapatan dari penjualan kendaraan tersebut.
3. Pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara benar, terarah dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yasid. (2009). *Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anonim.2006.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_.2014.Peraturan Daerah Provinsi NTT No.9 2014 *Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_.2014.Peraturan Gubernur No.21 2014 *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi NTT*.
- \_\_\_\_\_.2014.Peraturan Gubernur No.23 2014 *Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT*.
- \_\_\_\_\_.2014.Peraturan Gubernur No.23 2014 *Tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT*.
- \_\_\_\_\_.2010.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (di unduh 21 Februari 2018).
- \_\_\_\_\_.2003. Undang-undang No.17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_.2004. Undang-undang No.15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*.
- Cooper, Donald R., Schindler, Pamela S. (2006). *Riset Bisnis Volume I*. Jakarta: Pt Global Edukasi,.
- Efferin, Sujoko., Darwaji S.H., Tan, Yuliawati. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Fathoni, Siti Nur. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi(Dilengkapi Dasa-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Friska dkk (2015). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung Sulawesi Utara*.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Mohmmad Syam Kusufi. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikbar, (2016). Meneliti tentang *Analisis pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Janeponto)*.
- Ismawati (2017), meneliti tentang *Analisi Perlakuan akuntansi Aset Tetap pada BPJS Ketenagakerjaan*.
- Jones, D.B, 1985 “ *The Needs Of Users Of Govermental Financial Reports*”. Government Accounting Standarts Boards.
- Mulyati, (2015). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang*.
- Mustamin (2013), *Analisis pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap berdasarkan PP 71*.
- Novita (2015). *Analisis Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “ Senja Cerah”*.
- Sadondang (2015). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di RSUD Pancaran Kasih Manado*.
- Veronika dan Steven (2014). *Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada di-nas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Sitaro*.